

**ESKALASI KONFLIK PERANG DAGANG JEPANG DAN KOREA
SELATAN PADA SEKTOR EKONOMI TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Zahrah Ghina Nuraini Hadilistyorini

18323059

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**ESKALASI KONFLIK PERANG DAGANG JEPANG DAN KOREA
SELATAN PADA SEKTOR EKONOMI TAHUN 2019-2020
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Zahrah Ghina Nuraini Hadilistyorini

18323059

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

ESKALASI KONFLIK PERANG DAGANG JEPANG DAN KOREA

SELATAN PADA SEKTOR EKONOMI TAHUN 2019-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

16 Agustus 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

16 Agustus 2022



Zahrah Ghina Nuraini Hadilistyurini

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	3
DAFTAR ISI	5
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	16
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	16
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II	21
HUBUNGAN BILATERAL KOREA SELATAN	21
DAN JEPANG SEBELUM 2019	21
2.1. Hubungan bilateral Korea Selatan dengan Jepang	22
2.2. Isu Comfort Women Korea Selatan dan respon Jepang	25
2.3. Upaya Korea Selatan dalam Memberhentikan dan Mengatasi Dampak Perang Dagang	29
BAB III	35
3.1. Eskalasi Konflik Fase Utama I	36
3.1.1 Tahapan Pertama	36
3.1.2 Tahapan Kedua	38
3.1.3 Tahapan Ketiga	41
3.2. Eskalasi Konflik Utama Fase II	42
3.2.1 Tahapan Keempat	42
3.2.2 Tahapan Kelima	43

3.2.3 Tahapan Keenam	44
3.3. Eskalasi Konflik Fase Utama III	47
3.3.1 Tahapan Ketujuh	47
3.3.2 Tahapan Kedelapan	48
3.3.3 Tahapan Kesembilan	49
BAB IV	51
2.1. Kesimpulan	51
2.2 Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	54



ABSTRAK

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan beberapa tahun ini terus mengalami ketegangan. Hal tersebut, ditandai dengan adanya luka masa lalu yang dialami oleh masyarakat Korea Selatan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang pada saat masa penjajahan di Korea Selatan. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengeluarkan kebijakan berupa melakukan pembatasan ekspor terhadap bahan semikonduktor. Dengan adanya pembatasan tersebut, menjadikan kedua negara melakukan aksi saling menyerang dan menjadikan terjadinya peristiwa perang dagang. Korea Selatan sendiri merupakan negara yang sangat membutuhkan bahan semikonduktor, dimana nantinya akan digunakan untuk memproduksi layar telepon pintar dan chip.

Penelitian ini akan membahas mengenai eskalasi konflik yang pada saat perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan terhadap perekonomian terjadi. Dengan dilihat dari berbagai tahapan serta fase yang ada di dalam eskalasi konflik, konflik antara kedua negara dari yang awalnya tidak terlalu intens semakin lama semakin kompleks. Dalam menganalisis permasalahan perang dagang ini, penelitian akan menggunakan eskalasi konflik dari Friedrich Glasl.

Kata Kunci: Jepang, Korea Selatan, Perang Dagang, Eskalasi Konflik, Perekonomian

ABSTRACT

Relations between Japan and South Korea have been strained in recent years. This is marked by past wounds experienced by the people of South Korea due to the policies issued by Japan during the colonial period in South Korea. In addition, the Japanese government also issued a policy in the form of restricting exports of semiconductor materials. With these restrictions, the two countries took action against each other and caused a trade war to occur. South Korea itself is a country that is in dire need of semiconductor materials, which will later be used to produce smartphone screens and chips.

This study will discuss the escalation of conflict during the trade war between Japan and South Korea on the economy. By looking at the various stages and phases in the escalation of the conflict, the conflict between the two countries from the beginning was not too intense, became increasingly complex. In analyzing this trade war problem, this research will use the conflict escalation from Friedrich Glasl.

Keywords: Japan, South Korea, Trade War, Conflict Escalation, Economy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang dan Korea Selatan memiliki hubungan yang cukup dekat dimana tidak hanya bekerja sama dalam bidang perdagangan saja, namun juga dalam bidang budaya, dan keamanan. Perang dagang sendiri merupakan suatu masalah atau konflik ekonomi yang dimana salah satu negara tersebut mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu pembatasan impor atau meningkatkan tarif dalam perdagangan agar merugikan perdagangan satu sama lain (Lisbet 2019). Pada awalnya konflik antara Jepang dan Korea Selatan terjadi karena adanya luka masa lalu dimana Jepang melakukan kebijakan yang merugikan warga Korea Selatan, seperti melarang penggunaan bahasa Korea, memaksa warga Korea Selatan menerima penamaan Jepang, dan merekrut secara paksa para wanita Korea Selatan untuk dijadikan sebagai budak seks (*comfort women*) bagi para tentara Jepang. Dengan adanya kebijakan tersebut dan perlakuan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan di masa lalu tersebut meninggalkan luka mendalam bagi warga Korea Selatan itu sendiri, bahkan luka ini juga menurun kepada kalangan muda di Korea Selatan yang dimana mereka sendiri tidak mengalami sejarah kelam tersebut (Lisbet 2019).

Ketegangan kedua negara tersebut semakin parah dengan tidak adanya inisiatif dari pemerintah Jepang itu sendiri untuk mengakui keterlibatan militer Jepang dalam sistem *comfort women* dan tidak bertanggung jawab atas korban dari *comfort women* di Korea Selatan. Pada tahun 1993 dalam sebuah pernyataan

yang disebut dengan Pernyataan Kono, Jepang mengakui adanya keterlibatan dalam sistem *comfort women* (Nugroho and Bahri 2019). Akan tetapi, karena kurangnya tidak lanjut dari pernyataan tersebut dan pemerintah Jepang yang tidak konsisten dalam mempertahankan pernyataannya membuat tuntutan mengenai *comfort women* terus bergulir. Belum terselesaikannya permasalahan *comfort women*, Korea Selatan kembali menuntut Jepang untuk membayar ganti rugi kepada rakyat Korea Selatan yang dulu diperlakukan sebagai buruh paksa pada masa perang 1910-1935 (Nugroho and Bahri 2019). Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan kembali bersitegang pada tanggal 4 Juli 2019. Dimana pada saat itu, Kementerian Perdagangan Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan dengan melakukan pembatasan terhadap ekspor bahan material teknologi tinggi yang dimana digunakan untuk memproduksi layar telepon pintar dan chip ke Korea Selatan (Lisbet 2019).

Pemerintah Jepang juga mengharuskan para pelaku eksportir untuk melakukan pendaftaran dirinya apabila ingin mengekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan. Dengan adanya pembatasan ekspor tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan kembali kepada kedua negara tersebut (Lisbet 2019). Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Jepang ini diambil dikarenakan adanya alasan mengenai keamanan nasional Jepang itu sendiri, yang dimana sebagai bentuk pengawasannya terhadap kegiatan ekspor dan juga pemenuhan kewajiban internasional untuk menjaga teknologi tertentu yang dapat digunakan dalam bidang keamanan atau militer. Perang dagang yang terjadi tersebut memberikan kebijakan mengenai pembatasan ekspor kepada produk produk yang akan dikirim ke Korea Selatan. Dampak dengan adanya pembatasan

ekspor tersebut perekonomian di Korea Selatan mengalami kesulitan terutama pada perusahaan-perusahaan besar khususnya seperti industri ponsel cerdas dan semikonduktor yang menjadi andalan bagi negara Korea Selatan yang biasanya mereka memperoleh bahan semikonduktor dari negara Jepang, kemudian dampak perang dagang bagi negara Jepang itu sendiri adalah dimana mobil-mobil buatan Jepang yang berada di pasaran Korea mulai tidak laku dan ditarik dari pasaran Korea Selatan (Lisbet 2019).

Penelitian ini penting, dikarenakan dengan melakukan adanya penelitian ini dapat lebih mudah memahami bagaimana dan apa penyebabnya perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan tersebut dapat terjadi dimasa lalu hingga kembali bersitegang sampai saat ini. Lalu, dengan adanya penelitian ini tidak hanya melihat perang dagang tersebut hanya dengan satu teori atau satu sudut pandang saja, melainkan dengan teori atau sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori eskalasi konflik yang dimana dapat membantu untuk memberikan sudut pandang perang dagang dari sisi teori eskalasi konflik tersebut. Meskipun di studi-studi sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang perang dagang ini, namun belum ada yang meneliti tentang perang dagang secara spesifik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membantu memberikan sudut pandang dari perang dagang ini dari sisi teori eskalasi konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan didalam latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana eskalasi konflik antara Jepang dan Korea Selatan pada perang dagang tahun 2019-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana perang dagang Jepang dan Korea Selatan pada 2019-2020 khususnya yang memberikan dampak pada sektor ekonomi

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada analisis perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea terhadap ekonomi Korea pada tahun 2019-2020 agar pembahasan tidak terlalu melebar atau terlalu luas. Sehingga dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai sikap Korea Selatan terhadap perang dagang tersebut kepada perekonomian Korea Selatan itu sendiri (Lisbet 2019). Isu perang dagang yang dimaksud adalah isu terkait ekonomi yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan. Hal ini sesuai dengan tahun cakupan yang diteliti yaitu pada tahun 2019-2020, dimana isu perang dagang antara Jepang

dan Korea Selatan menjadi pembahasan yang sangat ramai oleh masyarakat internasional pada tahun 2019 dan juga pada saat itu kembalinya terjadi ketegangan antara kedua negara tersebut. Penulis berhenti pada tahun 2020 dikarenakan Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae-in mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Jepang dengan cara menghubungi Perdana Menteri Jepang yang baru yaitu Suga Yoshihide melalui telepon dan membahas mengenai berbagai macam permasalahan terutama mengenai kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada masa penjajahan terhadap Korea Selatan. Direktur Badan Intelijen Nasional Park Jie-won melakukan kunjungan ke Tokyo yang dimana melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang. Dalam pembicaraannya dengan Park, Suga mengatakan bahwa hubungan Jepang-Korea Selatan sangat diperlukan, akan tetapi juga mengatakan bahwa Seoul harus membuat langkah pertama untuk meredakan ketegangan (Stangarone 2020).

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian mengenai topik ini sudah ada yang membahas, contohnya seperti penelitian yang ditulis oleh Lukluk Nurbaiti pada tahun 2021 dengan judul “Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor ke Korea Selatan”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari tahun 1965 hingga tahun 1980an, impor Korea Selatan bergantung pada Jepang. Produk yang diimpor oleh Korea Selatan adalah bahan IC semikonduktor, baja, peralatan mesin, suku cadang komputer. Setelah Korea Selatan merdeka dari Jepang, perekonomian Korea Selatan berada di posisi terendah, bahkan Korea

Selatan menduduki peringkat kedua negara termiskin dengan GDP per kapita US\$100 (Nurbaiti 2021). Dikarenakan adanya faktor neraca perdagangan yang tidak seimbang sehingga menjadikan Korea Selatan berusaha untuk mengevaluasi kerjasama ekonomi dengan Jepang. Untuk tetap mendapatkan keuntungan, pemerintah Jepang dan Korea Selatan melakukan negosiasi kerjasama perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*). Hubungan antara Jepang dengan Korea Selatan merenggang dikarenakan Jepang membatasi ekspor material semikonduktor ke Korea Selatan (Nurbaiti 2021). Penelitian ini belum melakukan pembahasan mengenai apa saja yang menjadi kerugian bagi negara Korea selatan khususnya dalam perekonomian akibat adanya perang dagang, sehingga disini peneliti akan meneliti dampak perekonomian Korea Selatan dari adanya perang dagang antara Jepang dengan Korea Selatan.

Kemudian adanya penelitian mengenai terjadinya perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan yang ditulis oleh Lisbet pada tahun 2019 dengan judul “Ketegangan Hubungan Jepang-Korea Selatan Implikasinya”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Kementerian Perdagangan Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan sebuah pembatasan terhadap ekspor bahan material berteknologi tinggi untuk memproduksi layar telepon pintar dan chip ke Korea Selatan dan juga pemerintah Jepang mengharuskan para eksportir untuk mendaftarkan diri apabila hendak mengekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan (Lisbet 2019). Keputusan tersebut diambil dikarenakan adanya alasan mengenai keamanan nasional, sebagai bentuk pengawasan terhadap proses kegiatan ekspor serta pemenuhan kewajiban internasional untuk menjaga ketat alih teknologi tertentu yang dapat digunakan di dalam bidang keamanan atau

militer (Lisbet 2019). Penelitian tersebut belum menjelaskan awal mula terjadinya ketegangan dua negara tersebut, sehingga disini peneliti akan meneliti awal mula terjadinya ketegangan kedua negara tersebut dimulai dari penjajahan yang dilakukan oleh Jepang pada saat dulu hingga terjadinya perang dagang pada tahun 2019.

Lalu adanya penelitian mengenai globalisasi industri hiburan Jepang dan Korea oleh Anniza Kemala pada tahun 2018 dengan judul “Globalisasi Industri Jepang dan Korea: Pengaruh Terhadap Perspektif Publik Antar Negara”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa hubungan kerjasama antara Jepang-Korea Selatan tidak hanya di industri otomotif saja melainkan juga di industri hiburan. Penyebaran industri hiburan Korea Selatan yang dilakukan melalui *Hallyu* merupakan salah satu fenomena terjadinya persebaran budaya yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. Penyebaran *Hallyu* sendiri telah menyebar keseluruhan penjuru dunia termasuk Jepang yang dilihat dari besarnya jumlah penyanyi Korea Selatan yang memulai “debut” nya di Jepang, dapat dikatakan bahwa pasar musik di Jepang merupakan salah satu target paling utama bagi industri hiburan di Korea Selatan untuk menyebarkannya *Hallyu* tersebut (Kemala 2018).

Hal ini dilatar belakanginya adanya fakta bahwa industri rekaman dan pasar rekaman Jepang sejak tahun 1999 berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam penjualan kotor tingkat dunia, yang membuat Jepang masuk menjadi industri terbesar kedua di dunia. Sehingga Korea Selatan berusaha untuk menjalin sebuah kerjasama industri hiburan dengan Jepang, karena adanya fakta tersebut yang dapat membuat perekonomian kedua negara dapat semakin maju

dikarenakan industri hiburan kedua negara tersebut menguasai dunia (Kemala 2018). Penelitian ini belum membahas mengenai permasalahan ekonomi akibat terjadinya perang dagang antara kedua negara tersebut, kemudian belum membahas hubungan bilateral antara kedua negara selain industri hiburan. Sehingga peneliti akan meneliti mengenai perekonomian kedua negara karena adanya perang dagang dan membahas hubungan bilateral kedua negara dari industri lain.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan teori eskalasi konflik. Makna konflik dalam perkembangan sekarang ini tidak hanya mengenai pertentangan kepentingan saja, akan tetapi dikarenakan sebab struktural, nilai-nilai, hubungan dan konflik data, yang kemudian diberikan tanggapan oleh aktor-aktor yang terlibat. Eskalasi akan semakin tinggi jika pihak-pihak yang berseberangan meningkatkan tekanan satu sama lain, dan tentu saja jika konflik cenderung mengarah kepada kondisi destruktif (merusak), prosesnya akan semakin sulit untuk mencapai konsensus (Impartial Mediator Network 2012). Di dalam artikelnya, Friedrich Glasl menjelaskan bahwa mekanisme psikologis dan sosiologis yang mendasari akan mendorong eskalasi terus berlanjut sampai salah satu atau kedua belah pihak mengalami keruntuhan. Eskalasi konflik merupakan sebuah proses yang bergerak secara bertahap, dari situasi yang kurang intens dan semakin kompleks. Glasl juga mengatakan bahwa terdapat sembilan tahapan eskalasi yang dimana setiap tahapan memiliki tingkatan yang berbeda.

Glasl menyimpulkan bahwa strategi intervensi tertentu lebih sesuai daripada yang lain untuk tahap eskalasi konflik tertentu. Di dalam konsep eskalasi konflik menurut Glasl terdapat tiga fase utama, yang dimana setiap fase terdiri dari tiga tahap (Jordan 2000).

Fase Utama I, yaitu dimana kedua belah pihak sudah menyadari terjadinya ketegangan akan tetapi mereka masih mencoba untuk memperlakukan pihak lain dengan cara yang rasional dan terkendali. Upaya untuk menyelesaikan konflik tetap dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, terutama menyangkut struktur organisasi, prosedur, material serta metode. Selama berada di tiga tahap pertama dalam fase utama, seseorang akan melihat dengan jelas terjadinya peningkatan dalam rumitnya suatu masalah serta penurunan dalam rumitnya suatu masalah (Jordan 2000). Dalam fase eskalasi ini terdapat tiga tahapan, yang pertama adalah dimana upaya untuk melakukan kerjasama dan secara sengaja masuk ke dalam ketegangan serta friksi. Tahap kedua, kedua belah pihak melihat satu sama lain sebagai subyek yang dimana memiliki nilai yang berbeda. Maksudnya adalah, dimana kedua belah pihak beranggapan bahwa dirinya sendiri lebih unggul serta melihat pihak lain sebagai kualitas yang lebih buruk. Kemudian tahap ketiga, yang dimana melalui sebuah tindakan, tidak hanya dengan kata-kata, akan tetapi juga perhatian akan beralih dari pertarungan verbal ke tindakan. Kedua belah pihak berhenti berbicara satu sama lain karena mereka yakin mereka tidak akan berhasil (Jordan 2000).

Fase utama II, dalam fase utama kedua hubungan timbal balik antara kedua belah pihak menjadi penyebab utama terjadinya ketegangan. Dimana kedua

belah pihak merasa ketidakpercayaan, kurangnya rasa hormat, serta terjadinya permusuhan secara terbuka berkembang yang menentukan semua tindakan (Jordan 2000). Di dalam fase utama kedua ini, mulai masuk kedalam tahap keempat yang dimana sikap kedua belah pihak berubah menjadi motif menang dan kalah. Para kedua belah pihak berusaha untuk mencoba mengumpulkan pendukung yang dimana para pendukung tersebut juga akan mengajukan kasus mereka. Kemudian tahap keenam, mulai muncul dominasi strategi ancaman. Pada tahapan sebelumnya, para kedua belah pihak ada kalanya menggunakan taktik ancaman, akan tetapi pada tahap enam penerapan ancaman menjadi lebih dominan dan digunakan untuk menentukan segala sesuatu yang terjadi (Jordan 2000).

Fase utama III, fase ini merupakan fase terakhir yang dimana para kedua belah pihak akan kehilangan kendali atas segala batasan kekerasan, dimana perselisihan akan berakhir dengan keruntuhan salah satu pihak. Dalam fase ini, para kedua belah pihak percaya bahwa posisi mereka tidak dapat didamaikan dan tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian tahap ketujuh, tujuan untuk menyebabkan terjadinya kerusakan satu sama lain menjadi yang paling utama (Jordan 2000). Sehingga, salah satu pihak akan lebih peduli dengan kerusakan yang dialami pihak lain daripada kerusakan yang diderita pihak sendiri. Pada tahap ke delapan ini, para kedua belah pihak mencoba untuk menyakiti pihak lain secara substansial. Yang terakhir, yaitu tahap ke sembilan dimana pada tahap ini para kedua belah pihak kehilangan atas segala batasan kekerasan. Konflik berakhir dengan terjadinya keruntuhan salah satu pihak (Jordan 2000).

Di dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, melihat dari adanya perang dagang ini penulis mencoba menganalisis dari sisi teori eskalasi konflik, dimana eskalasi konflik merupakan sebuah proses yang bergerak secara bertahap, dari situasi yang kurang intens dan semakin kompleks. Eskalasi konflik menurut Friedrich Glasl itu sendiri, terdapat tiga fase utama. Fase utama I, yang dimana kedua belah pihak sudah menyadari terjadinya ketegangan akan tetapi mereka masih mencoba untuk memperlakukan pihak lain dengan cara yang rasional dan terkendali. Fase utama II, hubungan timbal balik antara kedua belah pihak menjadi penyebab utama terjadinya ketegangan. Kemudian yang terakhir, fase utama III dimana para kedua belah pihak akan kehilangan kendali atas segala batasan kekerasan, dimana perselisihan akan berakhir dengan keruntuhan salah satu pihak

. Maksud dari ketiga fase utama tersebut adalah, dimana antara Jepang dan Korea Selatan yang dimana walaupun sudah menyadari adanya ketegangan, akan tetapi tetap berusaha untuk saling memperlakukan kedua belah pihak secara rasional dengan mencoba untuk tetap melakukan kerjasama selain di bidang ekonomi. Dikarenakan adanya permasalahan isu comfort women menyebabkan hubungan kedua belah pihak menjadi renggang, sehingga membuat pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan pembatasan ekspor terhadap bahan semikonduktor. Maka dari itu peneliti ingin membahas studi kasus tersebut menggunakan teori eskalasi konflik dikarenakan relevan yaitu perang dagang yang memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan tahapan eskalasi konflik perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan pada perang dagang tahun 2019-2020. Dimana adanya perang dagang, membuat hubungan kedua negara menjadi semakin memanas. Pada eskalasi konflik terdapat tiga fase utama serta sembilan tahapan, fase utama pertama yang dimana hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang itu sendiri tidak hanya dari sektor ekonomi saja akan tetapi dari sektor budaya, keamanan, kesehatan dan masih banyak lagi. Walaupun keadaan hubungan kedua negara sedang tidak baik, akan tetapi kerjasama di sektor lain tetap berjalan dikarenakan kedua negara memang tidak bisa lepas satu sama lain dan saling membutuhkan terkait isu-isu yang ada selain perang dagang.

Kemudian di fase selanjutnya, adanya hubungan timbal balik antara kedua negara menyebabkan terjadinya kedua belah pihak tidak percaya satu sama lain. Dimana Jepang melaporkan Korea Selatan kepada WTO akibat Korea Selatan melanggar peraturan yang telah dibuat oleh WTO terkait kebijakan anti dumping. Dengan dilaporkannya Korea Selatan kepada WTO, Korea Selatan merasa tidak percaya lagi dengan Jepang karena telah melaporkannya ke WTO. Lalu, fase yang terakhir yaitu fase ketiga dimana fase ketiga ini para kedua belah kehilangan kendali atas batasan kekerasan dan perselisihan yang terjadi akan berakhir dengan keruntuhan salah satu pihak. Akan tetapi, pada tahap ketiga ini tidak terjadi dikarenakan baik Korea Selatan dan Jepang tetap masih berusaha untuk melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan perang dagang dan ancaman yang dilakukan belum sampai meruntuhkan salah satu pihak. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang berupa perang dagang

yang terjadi antara Jepang dan Korea terhadap ekonomi Korea Selatan yang akan dianalisis menggunakan teori eskalasi konflik yang belum pernah diteliti pada studi-studi sebelumnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang sering digunakan di dalam ilmu sosial. Penelitian kualitatif itu sendiri lebih menekankan terhadap penggunaan diri peneliti sebagai instrumennya. Dalam melakukan suatu pengumpulan data kualitatif, peneliti harus menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen serta mengikuti asumsi-asumsi kultural yang ada dan mengikuti data yang telah ada. Selain itu, metode kualitatif lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih mementingkan proses daripada hasil akhirnya (Mulyadi 2011).

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian yang akan penulis bahas adalah mengenai Analisis dampak perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea terhadap ekonomi Korea Selatan. Dimana penulis akan menganalisis mengenai kebijakan-kebijakan, aktor, maupun dampak yang ditimbulkan dari adanya perang dagang tersebut terhadap perekonomian Korea Selatan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini adalah negara Jepang dan juga Korea Selatan. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah perang dagang yang terjadi antara Jepang dengan Korea Selatan. Hal ini dikarenakan penulis akan menganalisis dampak perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea terhadap ekonomi Korea.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menganalisis adalah dengan cara mengumpulkan berbagai macam buku, jurnal, artikel maupun berita yang pembahasannya sesuai dengan tema yang penulis teliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian adalah suatu proses yang menjadi sebuah langkah acuan bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian, proses ini dapat membantu penulis untuk menjelaskan apa yang akan diteliti secara rinci dan detail. Proses yang perlu dilakukan adalah:

1. Mencari Literatur

Pada tahap awal melakukan penelitian, penulis sangat perlu untuk mencari berbagai sumber data yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Referensi ataupun literatur yang akan penulis gunakan adalah berupa buku, jurnal, artikel, dan berita yang

memiliki tema ataupun topik yang sama dengan pembahasan yang akan penulis jelaskan dalam penelitian.

2. Analisa Literatur

Setelah memperoleh literatur yang diperlukan, penulis akan melakukan sebuah pengkajian ataupun menganalisis isi dari literatur yang telah didapatkan, dan memilah literatur mana yang sesuai dengan pembahasan yang akan penulis buat dengan memilah isi literatur tersebut kedalam penelitian penulis. Analisis literatur ini perlu dilakukan secara mendetail dan butuh ketelitian dikarenakan agar pembahasan yang akan dirujuk dalam penelitian tidak terlalu luas ataupun terlalu sempit dan tidak melenceng dari apa yang seharusnya akan dibahas.

3. Menulis Analisa

Setelah mencari dan menganalisa literatur yang telah didapatkan, penulis perlu untuk melakukan penulisan analisa yang telah didapatkan atau ditemukan yang dimana analisa ini didapatkan dari sumber atau literatur yang telah ada. Data maupun fakta yang telah didapatkan digabungkan dengan pembahasan lalu dijelaskan oleh penulis sehingga menghasilkan pendapat, pengertian, maupun pembahasan yang logis ataupun yang sesuai dengan topik penelitian penulis. Dalam melakukan penulisan analisa, pendapat maupun argumen penulis perlu digabungkan dengan pembahasan bersama data literatur yang telah didapat sebelumnya.

4. Review

Setelah mencari literatur yang telah ada atau telah ditemukan, melakukan analisis, dan menggabungkannya atau mengelaborasikannya dengan data-data yang telah ada, penulis perlu melakukan review kembali pada tulisan yang telah ditulis tersebut. Review yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang dibahas sudah relevan atau akurat dengan sumber yang sudah ada, argumen yang dibuat relevan dan logis, apakah topik yang ditulis sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan, dan memeriksa kekurangan lain yang kemungkinan masih ada dalam penelitian yang telah ditulis. Review itu sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang kita tulis sudah teliti, rinci, akurat atau sesuai, tidak terlalu luas ataupun tidak terlalu sempit, serta memeriksa kesalahan pada saat penulisan kata.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penulis akan menjabarkan beberapa bab yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi dan sistematika pembahasan penelitian yang akan penulis buat. Hal yang diuraikan di dalam bab 1 ini adalah mengenai struktur dalam penulisan isu atau topik penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis yaitu mengenai analisis eskalasi konflik Korea Selatan dan Jepang pada sektor ekonomi.

BAB II. HUBUNGAN BILATERAL KOREA SELATAN DAN JEPANG SEBELUM 2019

Dalam bab II ini yaitu konteks, penulis berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang ada sebagai pengantar sebelum melakukan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Informasi-informasi tersebut berupa pemahaman terkait isu perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan, serta hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis terkait isu yang diteliti. Oleh sebab itu, pada bab ini juga akan menjelaskan terkait teori eskalasi konflik yang akan digunakan untuk isu perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan terhadap sektor perekonomian.

BAB III. ANALISIS PERANG DAGANG TERHADAP PEREKONOMIAN KOREA SELATAN

Dalam bab III ini akan menjelaskan mengenai analisis perang dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea. Bagaimana perang dagang yang terjadi memberikan pengaruh terhadap perekonomian Korea Selatan.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab IV ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan pada akhirnya akan menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dibuat. Kemudian penulis juga akan memberikan saran dan rekomendasi bagi penelitian yang telah penulis teliti.



BAB II

HUBUNGAN BILATERAL KOREA SELATAN

DAN JEPANG SEBELUM 2019

Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang sendiri telah terjalin cukup lama yaitu pada tahun 1910, yang dimana Jepang pada saat itu melakukan penjajahan terhadap semenanjung Korea. Selama adanya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang banyak kebijakan yang merugikan masyarakat Korea Selatan, seperti melarang penggunaan bahasa Korea, memaksa warga Korea Selatan menerima penamaan Jepang, dan merekrut secara paksa para wanita Korea Selatan untuk dijadikan sebagai budak seks (*comfort women*) bagi para tentara Jepang (Lisbet 2019). Hubungan kedua kembali bersitegang pada tahun 2019 yang dimana Kementerian Perdagangan Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap kegiatan ekspor bahan material tinggi ke Korea Selatan. Selain adanya isu perang dagang, ternyata Jepang dan Korsel mengalami konflik mengenai perebutan klaim kedua negara terhadap beberapa pulau yang disebut Dokdo dalam bahasa Korea dan Takeshima yang merupakan bahasa Jepang. Jepang mengulangi pernyataannya dalam Buku Putih Pertahanan Jepang 2018 bahwa Dokdo adalah pulau teritorial Jepang. Kemudian Jepang mengklaim hak kedaulatan Pulau Dokdo dan menyebutnya sebagai Pulau Takeshima (Lisbet 2019).

2.1. Hubungan bilateral Korea Selatan dengan Jepang

Korea Selatan dan Jepang tidak hanya melakukan kerjasama hanya dari sektor ekonomi saja, akan tetapi dari sektor budaya. Di mana pada saat ini Korea Selatan terkenal dengan tren *Korea Wave* atau *Hallyu*-nya, *Korean Wave* sendiri menjadi sebuah senjata diplomasi Korea Selatan memperkenalkan budayanya ke negara-negara melalui tren *Hallyu* saat ini. *Korean Wave* sendiri lebih mengacu kepada popularitas budaya pop yang dimiliki oleh Korea Selatan yang tersebar di luar negeri, khususnya di negara-negara Asia. *Korean Wave* itu sendiri terdiri dari film, drama televisi, musik, makanan, *makeup*, *skincare*. *Korean Wave* tidak hanya memasarkan budaya Korea Selatan saja, akan tetapi juga memasarkan produk-produk komersial dan pariwisata Korea Selatan kepada publik di berbagai negara di dunia (Suryani 2014). Pada awalnya industri kreatif Korea Selatan terutama *Korean Wave* digunakan dan disebarluaskan untuk membangun ekonomi Korea Selatan setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997 (Firdausi and Pujiyono 2018).

Akan tetapi seiring dengan semakin berkembangnya *Korean Wave* yang menjadi kontribusi besar di industri kreatif Korea Selatan yang secara global, Korea Selatan menggunakan *Korean Wave* sebagai cara untuk menyebarkan budayanya secara internasional dan meningkatkan nama baik negaranya. Pendukung kebangkitan ekonomi Korea Selatan tidak lain adalah sektor industri teknologi transportasi dan teknologi komunikasi, dan sektor budaya juga didukung oleh *Korean Wave*. Apalagi dengan adanya globalisasi dan teknologi yang sangat canggih seperti saat ini, *Korean Wave* semakin dengan mudah masuk ke negara negara lain, dan dengan mudahnya budaya Korea Selatan bersaing dengan budaya yang ada di negara-negara tersebut (Firdausi and Pujiyono 2018).

Pada tahun 2010-2011 terdapat kenaikan pada persentase perekonomian Korea Selatan sebesar 50,89%, yang dimana persentase tersebut berasal dari budaya dan industri kreatif. Tahun 2004, dimana adanya ekspor film dan acara televisi, pariwisata, dan Hallyu yang menghasilkan pendapatan hampir US\$ 2 miliar. Pada tahun 2011 dengan adanya *Korean Wave* atau *Hallyu* telah menghasilkan pendapatan mencapai US\$ 794 juta dan juga mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun sebelumnya yang dimana hanya menghasilkan pendapatan sekitar US\$ 637 juta (Firdausi and Pujiyono 2018).

Pada tahun 1990 awal budaya Korea Selatan belum mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat Jepang, namun di awal tahun 2000-an, *Korean Wave* baru mendapat banyak tanggapan positif dari publik Jepang itu sendiri. Masyarakat Jepang baru mulai mengikuti perkembangan industri kreatif dari Korea Selatan tersebut, mulai dari musik, drama televisi, film, animasi, serta fashion. Industri Kreatif Jepang khususnya industri musik merupakan industri terbesar kedua setelah Amerika Serikat (Firdausi and Pujiyono 2018). Produk-produk industri kreatif Jepang nyaris didominasi oleh produk kosmetik atau produk dari artis domestiknya, dengan demikian artis atau produk dari luar Jepang berusaha untuk menarik perhatian masyarakat Jepang itu sendiri. Artis atau penyanyi yang berhasil masuk kedalam industri kreatif Jepang biasanya mereka bekerja sama dengan label rekaman yang besar di Jepang. *Korean Wave* melanda Jepang dan baik penyanyi maupun aktor asal Korea Selatan menjadi sangat terkenal di Jepang. Masuknya *Korean Wave* di Jepang diawali dengan adanya drama Korea (K-drama) yang berjudul *Winter Sonata* dan *Autumn in My Heart*. Lembaga penelitian ekonomi memperkirakan dampak ekonomi dari drama

“Winter Sonata” pada industri pariwisata Korea Selatan sebesar 84 juta won dan penjualan DVD di Jepang sebesar 3 triliun won. Dengan masuknya serial drama Korea ke negara Jepang yang memberikan pandangan positif, barulah kemudian musik pop Korea Selatan juga masuk ke dalam industri kreatif Jepang yang diawali dengan adanya salah satu penyanyi solo asal Korea Selatan yaitu, BoA dan idol grup pria bernama TVXQ. Pendapatan pasar hiburan dan media di Jepang diperkirakan mencapai 194 triliun won per tahun, lima kali ukuran pasar musik Korea (Firdausi and Pujiyono 2018).

Pada tahun 2019, Jepang mengalami peningkatan dalam pemasukan pendapatan pasar dan hiburan yang dimana banyaknya artis-artis asal Korea Selatan yang melakukan konser di Jepang. Contohnya adalah NCT 127, yang merupakan boyband asal Korea Selatan di bawah naungan SM Entertainment. Mereka mengadakan konser di Jepang, tepatnya di Osaka, Nagoya, dan Saitama dimana tiket konser yang dijual, sukses terjual habis dikarenakan penggemar dari NCT 127 sangat banyak. Disini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 *Korean Wave* semakin mendominasi di Jepang (Larasati 2022). Dengan adanya upaya ini, menyebabkan Korea Selatan berhasil untuk menyatukan budaya Barat dengan Timur dan menghasilkan sebuah produk yang bisa diterima oleh keduanya. Korea Selatan juga selalu melakukan pengembangan strategi dalam produksi produk budayanya, dikarenakan untuk mempertahankan penerimaan *Korean Wave* di berbagai negara. Seperti dalam industri musik Kpop, yang dimana banyak produksi lagu-lagu yang dibuat secara multibahasa untuk memperluas penggemar musik Kpop (Suryani 2014).

Kemudian selain melakukan hubungan bilateral di bidang kebudayaan, Korea Selatan dan Jepang juga bekerja sama dibidang keamanan atau militer. Dimana pada saat itu, baik Jepang maupun Korea Selatan mempertahankan serta menangkal negaranya dari ancaman Korea Utara dan Tiongkok. Adanya kerja sama tersebut digunakan untuk memperkuat aliansi yang dimiliki oleh kedua negara serta membentuk kemitraan trilateral dengan Amerika Serikat (Kim 2021). Korea Selatan dan Jepang menandatangani Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer, yang dimana dengan adanya perjanjian tersebut dapat saling memberikan informasi secara langsung terkait kegiatan militer serta nuklir Korea Utara. Dengan meningkatnya kerjasama pertahanan antara Korea Selatan dan Jepang, akan membuat Korea Utara lebih sulit untuk melakukan serangan ke Korea Selatan itu sendiri. Selain itu, Amerika Serikat juga membantu melakukan pertahanan apabila Korea Utara melakukan sebuah ancaman terhadap kedua negara tersebut (Kim 2021).

2.2. Isu *Comfort Women* Korea Selatan dan respon Jepang

Korea Selatan mengalami masa yang cukup kelam pada saat Jepang melakukan penjajahan terhadap Korea, yang dimana Jepang banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang cukup kejam bagi masyarakat Korea. Seperti melarang penggunaan Bahasa Korea, memaksa masyarakat Korea Selatan menerima penamaan Jepang, dan merekrut secara paksa para wanita Korea Selatan untuk dijadikan sebagai budak seks (*comfort women*) bagi para tentara Jepang. Pada tahun 1932 hingga berakhirnya Perang Dunia II, pemerintah Jepang telah merekrut secara paksa 200.000 wanita ke dalam perbudakan seksual dan ditempatkan di comfort stations. Para perempuan yang direkrut secara paksa oleh

tentara militer Jepang berkisar umur 11 tahun hingga 20 tahun, khususnya kepada perempuan yang tinggal di daerah atau di negara yang dijajah oleh Jepang selama Perang Dunia I dan II (Gracellia 2020). Dengan adanya kebijakan serta perlakuan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Korea Selatan di masa lalu, meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat Korea Selatan itu sendiri dan menimbulkan hal yang sentimen negatif dalam memandang Jepang (Adityani 2018).

Ditambah lagi dengan kurangnya inisiatif pemerintah Jepang, untuk mengakui keterlibatan militer Jepang dalam sistem “comfort women” dan bertanggung jawab atas korban “comfort women” di Korea Selatan. Sebenarnya, Jepang sendiri telah mengakui keterlibatan militer mereka dalam sistem “comfort women” dalam sebuah pernyataan yang disebut “Kono Statement” pada awal tahun 1993, tetapi dikarenakan kurangnya tindak lanjut atas pernyataan tersebut dan pemerintah Jepang yang tidak konsisten dalam mempertahankan pernyataan tersebut, sehingga menyebabkan tuntutan dari masyarakat Korea Selatan untuk pemerintah Jepang terkait isu “comfort women” datang terus menerus (Adityani 2018).

Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengirim kembali file ke pengadilan dan mengatakan bahwa keputusan Jepang bertentangan dengan Konstitusi Korea Selatan dan norma hukum internasional. Hubungan Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2013 kembali memanas, dilihat dari meningkatnya antipati masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang. Juli 2013 pengadilan Korea Selatan memerintahkan Mitsubishi Heavy Industries untuk memberikan kompensasi kepada lima warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di pabrik perusahaan selama masa kolonial Jepang di Korea (Nugroho and Bahri 2019).

Pengadilan tinggi Busan memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar \$71,800 kepada masing-masing dari lima orang Korea tersebut. Itu merupakan keputusan kedua perusahaan Jepang pada Juli 2013. Sebelumnya, pengadilan tinggi Seoul memerintahkan Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corporation untuk membayar masing-masing \$89,900 kepada keempatnya yang merupakan kompensasi dari kerja paksa (Nugroho and Bahri 2019).

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan mengeluarkan putusan bahwa, perusahaan Jepang harus membayar ganti rugi terhadap korban kerja paksa dan *comfort women* pada masa penjajahan Jepang. Perusahaan yang dituntut untuk melakukan ganti rugi adalah perusahaan Nippon Steel, Sumimoto Metal Corps, dan Mitsubishi Heavy. Ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang industri semikonduktor di Jepang (Nugroho and Bahri 2019). Pada tahun 2016, Jepang merespon adanya isu *comfort women* Korea Selatan melalui 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women. Pemerintah Jepang disini memberikan 1 milyar yen pada Agustus 2016 sesuai dengan nominal yang telah disetujui kedua belah pihak, yang nantinya akan disalurkan ke organisasi yang akan dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan (Putri 2018). Pada Januari 2019, pemerintah Jepang meminta untuk melakukan konsultasi diplomatik dengan pemerintah Korea Selatan. Akan tetapi, pemerintah Korea Selatan tidak menanggapi permintaan Jepang. Bulan Mei 2019, pemerintah Jepang menyampaikan informasi kepada Korea Selatan yaitu kedua negara menunjuk dewan arbitrase untuk menyelesaikan pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan oleh Korea Selatan (Nurbaiti 2021).

Namun hingga Mei, pemerintah Korea Selatan tidak memenuhi kewajibannya tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai dewan arbitrase. Dengan tidak dipenuhi penunjukan pihak ketiga, dewan arbitrase tidak dapat dibentuk, dan Jepang meminta Korea Selatan untuk segera menyelesaikan pelanggaran perjanjian yang dilakukan, serta menjaga komunikasi diplomasi antara kedua negara tersebut (Nurbaiti 2021). Pejabat kementerian luar negeri Jepang mengunjungi Seoul, untuk melakukan sebuah pembicaraan dengan pejabat dari Korea Selatan. Kunjungan yang dilakukan kementerian luar negeri Jepang dilakukan, pada saat hubungan bilateral antara Jepang dengan Korea Selatan sedang memanas dikarenakan permasalahan perang dagang. Kenji Kanasugi yang merupakan direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oceania tiba di Bandara Gimpo, Seoul pada hari Kamis, 8 Agustus 2019.

Kanusugi diagendakan akan mengadakan sebuah pembicaraan pada sore hari dengan Kim Jung-han, yang merupakan direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk urusan Asia dan Pasifik (Sebayang 2019). Di dalam pertemuan tersebut, diperkirakan Jepang akan mendesak Korea Selatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait kompensasi kerja paksa selama Perang Dunia II, Korea Selatan menuntut kompensasi dari Jepang untuk warga negara yang menjadi sasaran kerja paksa masa perang antara tahun 1910 dan 1945. Akan tetapi, Jepang mengatakan bahwa permasalahan kompensasi telah diselesaikan di bawah perjanjian 1965. Adanya perjanjian tersebut dapat memperbaiki hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, akan tetapi Korea Selatan mengacuhkan hal tersebut (Sebayang 2019).

Jepang yang tidak terima dengan perilaku yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut, kemudian melakukan pembatasan ekspor tiga bahan semikonduktor yang digunakan dalam chip ke Korea Selatan pada awal Juli 2019. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa keputusan tersebut dibuat atas dasar permasalahan keamanan nasional, dan bukan dikarenakan keputusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi kepada para pekerja paksa. Pada pertemuan tersebut, Korea Selatan diperkirakan akan mendesak Jepang untuk mencabut permasalahan pembatasan ekspor. Kanasugi juga akan bertemu dengan Lee Do-hoon, yang merupakan perwakilan khusus Kementerian Luar Negeri untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea untuk membahas Korea Utara (Sebayang 2019).

2.3. Upaya Korea Selatan dalam Memberhentikan dan Mengatasi Dampak Perang Dagang

Jepang dan Korea Selatan menjalin hubungan kerjasama bilateral baik dari segi bidang ekonomi, budaya, maupun keamanan. Akan tetapi kegiatan yang paling berpengaruh bagi kedua negara adalah kegiatan ekspor dan impor yang dimana Jepang merupakan salah satu negara terbesar penghasil semikonduktor di dunia (Sebayang 2018). Jepang juga melakukan ekspor bahan semikonduktor tersebut ke beberapa negara salah satunya adalah Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki perusahaan perusahaan teknologi canggih, yang dimana barang barang elektronik tersebut sangat laku dan ramai dipasaran dunia (Babe 2017). Komponen komponen semikonduktor yang ada didalam teknologi canggih seperti ponsel pintar tersebut yang berasal dari Jepang. Jepang dan Korea Selatan sendiri melakukan sebuah kerjasama yaitu

kegiatan ekspor bahan bahan semikonduktor yang nantinya akan dipakai di industri-industri di Korea Selatan.

Setelah adanya pengeluaran kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Jepang yaitu Abe Shinzo, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada bulan Oktober 2019 mengirim Perdana Menteri Lee Nak-yon ke Tokyo untuk menghadiri acara penobatan Kaisar Naruhito, dengan membawa surat pribadi yang berisi permintaan untuk memperbaiki hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Juru bicara Presiden Korea Selatan Ko Min-jung mengatakan bahwa, para pemimpin kedua negara mengadakan pembicaraan selama 11 menit di tengah-tengah KTT ASEAN di Thailand pada saat itu (Mangkuto 2019). Pada bulan September 2020 Perdana Menteri Shinzo Abe mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan alasan kesehatan, dengan adanya pengunduran diri Perdana Menteri Shinzo Abe diharapkan bahwa Seoul dan Tokyo dapat meningkatkan kerjasama atau bahkan dapat menyelesaikan perselisihan mengenai kompensasi bagi para korban kerja paksa oleh tentara Jepang selama terjadinya perang dunia kedua. Meskipun dampak keseluruhan boikot terhadap perdagangan bilateral memberikan dampak kecil, nampak cukup berdampak signifikan terhadap perusahaan tertentu (seperti Uniqlo), pariwisata Korea Selatan ke Jepang sebelum pandemic covid-19, dan impor produk seperti bir Jepang (Stangarone 2020).

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kembali menghubungi Perdana Menteri baru Jepang yaitu Suga Yoshihide untuk mencoba dan meningkatkan hubungan kedua negara. Dalam panggilan pertamanya dengan Presiden Moon, perdana menteri baru Jepang menyatakan keyakinannya bahwa Korea Selatan dan

Jepang tidak dapat meninggalkan hubungan bagi kedua negara tersebut yang dimana kedua negara bekerja sama dalam isu-isu seperti mengenai virus corona dan Korea Utara. Suga juga menjelaskan bahwa Jepang tidak akan mengubah posisinya tentang permasalahan kerja paksa (Stangarone 2020). Kedua negara mengadakan pertemuan tingkat kerja secara langsung pertama kali sejak awal pandemi, yang dimana untuk membahas permasalahan kerja paksa dan pembatasan perdagangan yang terkait dengan adanya perselisihan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh duta besar Jepang Tomita Koji di Forum Jeju, yang dimana dia mengatakan bahwa kedua negara perlu menciptakan lingkungan dimana kedua pemimpin dapat bertemu dan menanggapi harapan yang dapat dipegang oleh orang-orang di kedua negara. Direktur Badan Intelijen Nasional Park Jie-won melakukan kunjungan ke Tokyo yang mencakup pertemuan dengan Suga, kepala Sekretariat Keamanan Nasional Kitamura Shigeru, dan Sekretaris jenderal Partai Demokrat Liberal. Dalam pembicaraan dengan Park, Suga mengatakan bahwa hubungan Jepang-Korea Selatan sangat diperlukan akan tetapi Seoul harus membuat langkah pertama untuk meredakan ketegangan yang terjadi (Stangarone 2020).

Dalam isu *comfort women* itu sendiri, Korea Selatan sebenarnya belum berdamai. Masih banyak luka yang mendalam bagi masyarakat yang menjadi korban *comfort women* serta kerja paksa, akan tetapi pemerintah Korea Selatan berusaha untuk tetap memperjuangkan permasalahan isu *comfort women* tersebut. Kemudian walaupun kedua negara berselisih dengan permasalahan isu *comfort women* tersebut, tetapi Korea Selatan membutuhkan Jepang untuk melakukan kegiatan ekspor dikarenakan Korea Selatan membutuhkan bahan semikonduktor

yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi layar telepon pintar. Kegiatan ekspor dan impor antara Jepang dan Korea Selatan tiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan, akan tetapi dengan adanya situasi perang dagang menyebabkan beberapa penurunan terhadap ekspor antara Jepang dan Korea Selatan khususnya terhadap pada bahan-bahan semikonduktor yang biasa di kirim ke Korea Selatan. Akan tetapi Korea Selatan memiliki cara dengan adanya pemberlakuan pembatasan terhadap kegiatan ekspor bahan semikonduktor yang dilakukan oleh Jepang, yaitu dengan memproduksi mandiri bahan utama semikonduktor dan memberikan variasi terhadap pemasok dari Amerika Serikat, China, dan negara negara lain.

Dengan adanya memproduksi dari negara sendiri, bahan yang diimpor dari Jepang hanya seperempat saja (KBS World 2020). Jumlah ekspor dari Jepang ke Korea Selatan pada tahun 2019 sangat tinggi yaitu sebanyak \$44,9 miliar, yang dimana berarti Korea Selatan sangat bergantung terhadap ekspor dari Jepang khususnya pada bahan semikonduktor yang merupakan bahan untuk pembuatan layar telepon pintar dan chip (OEC 2021). Pada tahun 2019, Korea Selatan pun juga melakukan ekspor ke Jepang sebanyak \$28,3 miliar, memang ekspor yang dilakukan Korea Selatan ke Jepang tidak sebesar ekspor dari Jepang ke Korea Selatan (OEC 2021). Pada tahun 2020, walaupun masih adanya kasus perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan akan tetapi kegiatan ekspor dan impor tetap berjalan walaupun mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup banyak akan tetapi kegiatan ekspor maupun impor tetap berjalan (KBS World 2020).

Akibat dari adanya perang dagang bagi negara Jepang maupun Korea Selatan adalah dimana khususnya Korea Selatan yang memiliki perusahaan

ternama yang dimana perusahaan tersebut menghasilkan barang barang elektronik seperti telepon pintar yang membutuhkan bahan bahan semikonduktor untuk digunakan sebagai layar telepon serta chip yang ada di dalam rangkaian telepon (KBS World 2020). Padahal kedua negara baik Korea Selatan maupun Jepang sama sama saling bergantung satu sama lain baik dari kegiatan ekspor maupun impor. Yang dimana banyak barang barang asal Jepang yang beredar di pasaran Korea Selatan dan begitupun sebaliknya barang asal Korea Selatan beredar di pasaran Jepang. Akan tetapi dikarenakan adanya perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan memberikan dampak bagi barang barang asal Jepang yang beredar di Korea Selatan seperti menurunnya penjualan mobil asal Jepang setelah Korea Selatan melakukan pemboikotan terhadap barang produksi Jepang sebagai dampak dari adanya ketegangan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan.

Seperti penjualan terhadap merek alat transportasi yang berasal dari Jepang yaitu, Honda dan Toyota mengalami penurunan dalam penjualannya sejumlah 81% dan penjualan bir yang berasal dari Jepang juga mengalami penurunan sebesar 97%. Selain melakukan pemboikotan terhadap produksi mobil asal Jepang, Korea Selatan juga melakukan pemboikotan terhadap barang barang konsumsi, seperti bir yang juga mengalami kerugian sebanyak 50%, perusahaan makanan asal Jepang pun juga mengalami kerugian salah satunya adalah Ajinomoto yang mengalami penurunan penjualan sebanyak 35%, pakaian, kosmetik (CNN Indonesia 2019). Dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan dengan cepat menyusun sebuah upaya untuk mengatasi dari adanya dampak kebijakan tersebut. Pemerintah Korea Selatan melakukan berbagai strategi, dengan melakukan alokasi anggaran senilai KRW 7,8 triliun selama tujuh

tahun ke depan untuk mengamankan pasokan 100 bahan yang dimana berfungsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Jepang.

Mengurangi barriers serta melakukan diversifikasi sumber pasokan ke AS, Tiongkok, atau negara negara lainnya. Memberikan dukungan finansial kepada sebuah perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan asing. Memperluas tax benefits untuk mendatangkan investasi asing, relaksasi peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan untuk meningkatkan produksi (Asih and Suksmonohadi 2019). Otoritas keuangan (Financial Services Commission) dan pasar (Financial Supervisory Authority) membentuk kelompok kerja dengan sejumlah bank besar untuk meninjau jatuh tempo utang luar negeri Jepang dan mengembangkan rencana darurat untuk menghadapi dampak buruknya hubungan Jepang-Korea Selatan di Jepang kepada keuangan atau sektor keuangan (Asih and Suksmonohadi 2019).

BAB III

ANALISIS PERANG DAGANG TERHADAP PEREKONOMIAN

Teori eskalasi konflik merupakan teori yang akan dikaitkan dengan studi kasus dari perang dagang antara Jepang dengan Korea Selatan. Teori eskalasi konflik menurut Friedrich Glasl itu sendiri, terdapat tiga fase utama. Analisisnya adalah dimana letak adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang mengenai pembatasan kegiatan ekspor dan impor yang menyebabkan terjadi perang dagang antara Jepang dengan Korea selatan yang berdampak bagi perekonomian negara Korea Selatan. Dengan menggunakan teori eskalasi konflik yang dimana sebuah proses yang bergerak secara bertahap, dari situasi yang kurang intens dan semakin kompleks.

Mulai dari Jepang dan Korea Selatan yang berusaha untuk tetap memperlakukan kedua belah pihak secara rasional, walaupun sudah mengetahui bahwa sedang terjadi adanya ketegangan dengan tetap melakukan kerjasama di bidang lain selain ekonomi. Kemudian, Korea Selatan juga berusaha untuk tidak terlalu bergantung kepada Jepang dalam permasalahan ekspor barang-barang yang berasal dari Jepang. Yang dimana Korea Selatan berusaha untuk membuat bahan

semikonduktor sendiri agar tidak selalu bergantung kepada Jepang, tidak hanya itu pemerintah Korea Selatan juga menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang dan juga dapat memberikan kesempatan kepada produk dalam negerinya agar dapat lebih maju serta tidak kalah saing dengan produk asal Jepang.

3.1. Eskalasi Konflik Fase Utama I

Dalam fase pertama dari eskalasi konflik, kedua belah pihak sudah menyadari terjadinya ketegangan akan tetapi mereka masih mencoba untuk memperlakukan pihak lain dengan cara yang rasional dan terkendali. Selama terjadinya proses eskalasi, kedua belah pihak banyak mengalami kendala yang dimana berasal dari pihak-pihak yang bukan dari sumber konflik yang obyektif. Upaya untuk menyelesaikan konflik tetap dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, terutama menyangkut struktur organisasi, prosedur, material serta metode. Di dalam fase utama I, terdapat tiga tahapan yang dimana kita dapat melihat adanya kenaikan serta penurunan dalam kompleksitas masalah.

3.1.1 Tahapan Pertama

Tahapan yang pertama adalah dimana adanya sebuah usaha untuk saling bekerjasama dan secara tidak sengaja ikut masuk ke dalam ketegangan yang terjadi. Selama terjadinya diskusi, kedua belah pihak menyadari bahwa terkadang pendapat menjadi lebih jelas. Kedua belah pihak menyadari bahwa mereka tidak boleh menerima kerja sama begitu saja, akan tetapi harus dipertahankan dengan pengorbanan. Ketika salah satu pihak menolak untuk bekerjasama, hambatan dan konfrontasi kekerasan dapat terjadi, mencegah kedua belah pihak dari diskusi atau

negosiasi lebih lanjut serta tawar-menawar. Proses kristalisasi karakter untuk memenuhi harapan karakter tertentu yang tampaknya berguna untuk mempertahankan statusnya.

Jika melihat dari tahap pertama, Jepang dan Korea Selatan sebenarnya sudah menjalin hubungan kerjasama dari lama. Yang dimana kedua negara yaitu Jepang dan Korea Selatan melakukan kerjasama di bidang kebudayaan. Dengan adanya kerjasama di bidang kebudayaan tersebut, membuat kedua negara saling bertukar kebudayaan yang berbeda. Seperti masuknya *Korean Wave* ke negara Jepang, dan sebaliknya anime masuk ke dalam Korea Selatan. Dengan masuknya *Korean Wave* ke Jepang membuat keuntungan bagi kedua negara tersebut, yang dimana warga Jepang akan berkunjung ke negara Korea Selatan sehingga pendapatan pariwisata Korea Selatan menjadi meningkat (Firdausi and Pujiyono 2018). Begitupun sebaliknya apabila Grup musik Kpop menjalankan konser *world tour* di Jepang, akan meningkatkan pemasukan bagi negara Jepang dikarenakan para penggemar yang datang tidak hanya penduduk asal Jepang saja, akan tetapi dari berbagai dunia datang untuk menyaksikannya idolanya.

Contohnya adalah NCT 127, yang merupakan boyband asal Korea Selatan di bawah naungan SM Entertainment. Mereka mengadakan konser di Jepang pada tahun 2019, tepatnya di Osaka, Nagoya, dan Saitama dimana tiket konser yang dijual, sukses terjual habis sebanyak 74.000 tiket dikarenakan penggemar dari NCT 127 sangat banyak. Para penggemar yang membeli tiket konser tersebut tidak hanya penggemar asal Jepang saja, akan tetapi dari berbagai negara rela untuk membeli tiket konser yang diadakan di Jepang tersebut (Larasati 2022). Selain grup musik asal Korea Selatan, produk-produk *makeup*, *skincare*, makanan

serta drama televisi juga mendominasi di negara Jepang. Akan tetapi di Korea Selatan sendiri produk-produk dari Jepang juga mendominasi pasaran Korea Selatan, seperti otomotif, minuman bir, serta anime (Firdausi and Pujiyono 2018). Sehingga dengan adanya kerjasama di bidang kebudayaan dapat mengetahui mengenai kebudayaan kedua negara.

Selain di bidang kebudayaan, Korea Selatan serta Jepang juga melakukan kerjasama dibidang keamanan atau militer. Dimana adanya kerjasama tersebut untuk memperkuat dari serangan ancaman yang dilakukan Korea Utara mengenai nuklir, dengan melakukan kerjasama tersebut kedua negara dapat saling memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan Korea Utara dan dapat memperkuat pertahanan negara kedua negara tersebut dari ancaman yang diberikan (Kim 2021). Meskipun kedua negara terlibat ketegangan terkait isu masa lalu, akan tetapi kerjasama di bidang lain masih tetap berjalan. Dengan adanya hubungan kerjasama yang masih terjalin antara kedua negara membuktikan bahwa walaupun masih terjadinya ketegangan akibat permasalahan pada masa lalu, Korea Selatan dan Jepang masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara. Jepang dan Korea Selatan juga terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masa lalu.

3.1.2 Tahapan Kedua

Selepas melalui ketegangan di tahapan pertama, kedua belah pihak memberikan bukti yang beragam. Dimana kedua belah pihak melakukan sebuah kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan mereka, yang dimana mereka melakukan kerjasama tersebut untuk melindungi posisi sosial serta keyakinan mereka masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan di tahapan pertama, kedua

negara sudah pernah melakukan kerjasama di bidang kebudayaan walaupun keadaan masih terlibat ketegangan akan tetapi kerjasama di bidang selain ekonomi masih tetap berjalan. Akan tetapi, saat ini para kedua belah pihak mulai memandang satu sama lain sebagai subjek yang memiliki nilai berbeda. Dimana kedua belah pihak, menganggap dirinya sendiri lebih unggul dan pihak lain lebih rendah dari diri mereka.

Dengan adanya kedua belah pihak yang ingin menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka lebih unggul dari yang lain, menciptakan gangguan lebih lanjut pada perdebatan. Seperti Jepang yang membuat *Japan-ROK Agreement on Comfort Women* serta memberikan 1 milyar yen untuk menyelesaikan permasalahan isu *comfort women* akan tetapi perjanjian tersebut tetap gagal, dikarenakan permasalahan ini belum selesai dilihat dari sisi para korban yang berasal dari Korea Selatan seperti terdapat kelalaian pemerintah Jepang atas kepentingan dan hak-hak yang di dapat untuk para korban. Sehingga kemudian pada Januari 2019, pemerintah Jepang melakukan konsultasi diplomatik dengan pemerintah Korea Selatan. Akan tetapi, Korea Selatan menolak untuk melakukan konsultasi diplomatik dengan pemerintah Jepang dikarenakan Korea Selatan hanya ingin Jepang mengakui dan melakukan ganti rugi terhadap para korban kerja paksa serta *comfort women* (Nurbaiti 2021).

Dengan adanya permasalahan tersebut, membuat hubungan antara Jepang dan Korea Selatan menjadi buruk. Pemerintah serta masyarakat Korea Selatan juga memboikot adanya produk-produk yang berasal dari Jepang, dikarenakan permasalahan mengenai penghapusan Korea Selatan dari *whitelist* Jepang. Dengan itu membuktikan bahwa dengan adanya pemboikotan terhadap produk-produk

Jepang, produk-produk lokal asal Korea Selatan juga bisa menjadi lebih maju dan kuat daripada produk-produk Jepang (Nurbaiti 2021). Glasl mengatakan bahwa, sebuah konflik merupakan sejenis dengan kekerasan intelektual. Akan tetapi, para kedua belah pihak percaya bahwa perbedaan mereka dapat diselesaikan secara lisan. Pada saat yang sama, komunikasi diantara kedua belah pihak tidak mengalami perkembangan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kedua negara yaitu Jepang dan Korea Selatan tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan isu *comfort women*. Dengan membayar 1 milyar yen kepada Korea Selatan, akan tetapi masyarakat Korea Selatan menolak perjanjian tersebut dikarenakan tidak sepadan dengan apa yang telah dirasakan para korban kerja paksa serta *comfort women*.

Sebenarnya dengan adanya kesepakatan tersebut merupakan sebuah proses untuk menuju perdamaian bagi kedua negara yang telah lama tertunda, akan tetapi proses tersebut menjadi gagal dikarenakan pemerintah Korea Selatan yang untuk tetap memihak kepada warga negaranya. Seperti pada tahap kedua ini, kedua belah pihak masih percaya bahwa masalah yang ada dapat diselesaikan. Seperti pada tahap pertama, yang dimana kedua negara telah bekerja sama untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara. Akan tetapi, dengan terjadinya perdebatan antara Jepang dengan masyarakat Korea Selatan yang dimana terus menerus mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan terjadinya kegagalan dalam perjanjian yang telah dibuat, membuat Jepang dan Korea Selatan berada pada tingkat perselisihan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Meskipun masih di tahap kedua, ketegangan antara kedua negara semakin terlihat dengan jelas.

3.1.3 Tahapan Ketiga

Pada tahap ketiga, perhatian berubah yang pada awalnya dari pertarungan secara verbal menjadi pertarungan secara aksi. Dimana kedua belah pihak berhenti untuk berbicara satu sama lain dikarenakan mereka berpikir apapun yang mereka lakukan pasti gagal. Mereka berpikir bahwa tempat yang sekarang dilalui ini sudah pasti dan hanya digerakkan oleh sebuah perbuatan saja. Meneruskan dari tahapan kedua, bahwa pemerintah Korea Selatan menolak untuk melakukan pertemuan terkait permasalahan negosiasi kompensasi yang akan Jepang lakukan. Jepang terus menerus memaksa Korea Selatan untuk melakukan negosiasi guna membatalkan permasalahan kompensasi terhadap korban *comfort women* serta kerja paksa yang dimana Korea Selatan tidak menanggapi permasalahan negosiasi tersebut (Putri 2018). Kemudian Jepang melakukan balas dendam dengan membatasi ekspor semikonduktornya ke Korea Selatan pada tahun 2019. Dengan adanya kejadian tersebut, dapat dilihat bahwa kepercayaan yang dulu sangat erat antara Jepang dan Korea Selatan menjadi rusak.

Glasl juga mengatakan bahwa di tahap ketiga, para pemimpin sebagai pembicara dan tekanan internal akan muncul menyesuaikan diri. Hilangnya rasa empati, adanya tindakan yang kurang baik dari salah satu pihak akan menghalangi tindakan pihak lain, yang dimana menciptakan rasa frustrasi bersama bagi kedua belah pihak. Jika dilihat dari fase utama pertama, tahapan eskalasi pertama sampai ketiga dapat disimpulkan bahwa motivasi para kedua belah pihak berubah dari yang bersifat kerjasama menjadi kompetisi. Seperti gagalnya perjanjian antara Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women* pada tahun 2015 padahal dengan terjadinya kegagalan perjanjian pada tahun 2015 tersebut membuat kedua belah pihak frustrasi dikarenakan dengan adanya

perjanjian tersebut hubungan kedua negara dapat kembali seperti semula. Dengan gagalnya perjanjian tersebut membuat permasalahan semakin lama semakin meluas. Pada Januari 2019, pemerintah Jepang meminta untuk melakukan konsultasi diplomatik dengan pemerintah Korea Selatan. Akan tetapi, pemerintah Korea Selatan tidak menanggapi permintaan Jepang dan tetap pada pendiriannya yaitu dengan Jepang yang memberikan kompensasi kepada pihak korban kerja paksa dan *comfort women* (Sebayang 2018).

3.2. Eskalasi Konflik Utama Fase II

Dalam fase utama kedua dari eskalasi konflik, hubungan timbal balik para kedua belah pihak menjadi alasan utama terjadinya ketegangan. Yang dimana kedua belah pihak mulai timbul rasa ketidakpercayaan, kurang rasa hormat dan permusuhan secara terang-terangan yang semakin berkembang yang dimana menentukan sebuah tindakan. Kedua belah pihak tidak yakin untuk menyelesaikan konflik yang ada.

3.2.1 Tahapan Keempat

Pada tahap keempat ini, perilaku para kedua belah pihak menjadi sebuah motif menang atau kalah. Kemudian, perhatian terhadap reputasi dan aliansi juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masing masing pihak. Kedua belah pihak berusaha untuk mengumpulkan pendukung yang dimana mereka juga akan mengajukan permasalahan mereka. Seperti pada 10 September 2019, dimana pada saat itu Jepang memberikan laporan kepada WTO bahwa kebijakan anti dumping pada *pneumatic valves* yang dilakukan Korea Selatan pada tahun 2018 telah melanggar peraturan internasional. Kemudian, mengenai adanya analisis harga

serta keterbukaan terkait informasi produk *pneumatic valves* tidak memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh WTO.

Hakim dari WTO meminta Korea Selatan untuk membawa langkah-langkahnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan WTO, akan tetapi Korea Selatan menolak aspek tersebut. Korea Selatan juga gagal dalam memberikan ringkasan informasi terkait bisnis rahasia tersebut. Dari tahapan keempat ini, dapat dilihat bahwa masing-masing pihak hanya memandang dirinya sebagai yang paling berani dan memiliki sikap baik terhadap pihak lain yang dianggap memiliki sikap buruk serta rendah.

3.2.2 Tahapan Kelima

Tahap kelima ini, kedua belah pihak memandang satu sama lain bahwa yang dilakukan adalah sebuah kebohongan. Sebuah peristiwa yang tidak dapat dikendalikan bisa digunakan sebagai bukti konfrontasi dari pihak lain. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat kedua belah pihak mulai melakukan aksi saling menyerang untuk memberikan bukti bahwa pihak lawan berbohong. Dengan adanya aksi saling menyerang tersebut membuat kedua belah pihak kehilangan martabatnya terhadap pihak yang terlibat aksi tersebut. Kedua belah pihak berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan martabat diri mereka masing-masing setelah terjadinya peristiwa saling menyerang. Seperti pada 10 September 2019, dimana pada saat itu Jepang memberikan laporan kepada WTO bahwa kebijakan anti dumping pada *pneumatic valves* yang dilakukan Korea Selatan pada tahun 2018 telah melanggar peraturan internasional.

Kemudian, mengenai adanya analisis harga serta keterbukaan terkait informasi produk *pneumatic valves* tidak memenuhi persyaratan yang telah dibuat

oleh WTO. Hakim dari WTO meminta Korea Selatan untuk membawa langkah-langkahnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan WTO, akan tetapi Korea Selatan menolak aspek tersebut. Korea Selatan juga gagal dalam memberikan ringkasan informasi terkait bisnis rahasia tersebut. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa rasa saling percaya antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi. Glasl juga mengatakan bahwa perubahan dari tahapan kelima dimana kedua belah pihak akan sangat menahan diri dan menganggap bahwa konflik sebagai hal yang paling penting. Permasalahan yang tidak penting juga dilihat dari berbagai sudut pandang.

Contohnya adalah permasalahan mengenai kebijakan anti dumping, yang dimana Jepang menuduh Korea Selatan yang melanggar kebijakan tersebut. Korea Selatan tidak mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran serta tidak mau memberikan ringkasan terkait bisnis rahasia. Barulah Jepang melaporkan kepada WTO bahwa yang dilakukan Korea Selatan adalah sebuah pelanggaran, Korea Selatan yang tetap tidak mau menerima keputusan hakim WTO pun disebut sebagai kebohongan karena mengatakan bahwa mereka tidak bersalah dan tidak bisa memberi informasi terkait bisnis rahasia, kemudian kedua negara saling menuduh dan membela dirinya masing-masing serta melaporkan kembali ke WTO.

3.2.3 Tahapan Keenam

Pada tahap-tahap sebelumnya, banyak terjadi peningkatan dalam eskalasi konflik itu sendiri. Dimana kedua belah pihak menggunakan beberapa taktik yang berupa ancaman, akan tetapi pada tahapan keenam ini sebuah ancaman menjadi lebih dominan untuk memutuskan apa yang akan terjadi. Adanya ancaman

digunakan untuk menggantikan tingkatan pihak lain dengan melakukan sebuah tekanan. Apabila salah satu pihak mengeluarkan sebuah ancaman, maka pihak lain akan melakukan balas dendam dengan sebuah ancaman juga. Contohnya adalah seperti Jepang yang melakukan pembatasan ekspor terhadap bahan semikonduktor kepada Korea Selatan pada tahun 2019, dimana bahan-bahan semikonduktor sangat penting bagi industri-industri elektronik Korea Selatan dikarenakan bahan tersebut merupakan bahan utama untuk pembuatan layar telepon pintar dan chip. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengharuskan para pelaku eksportir untuk melakukan pendaftaran dirinya, dimana dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dalam melakukan ekspor membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari.

Dengan adanya pembatasan ekspor tersebut membuat Korea Selatan kewalahan dikarenakan dapat mengancam perekonomiannya. Setelah pemberlakuan pembatasan ekspor, Korea Selatan mencoba untuk melakukan diskusi terhadap Jepang tentang permasalahan isu *comfort women*, yang dimana isu tersebut masih belum menemukan titik tengahnya. Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa Jepang harus membayar kompensasi terhadap korban *comfort women* dan kerja paksa, akan tetapi Jepang yang tidak terima dengan keputusan Korea Selatan dan tidak mau membayar kompensasi tersebut dikarenakan Jepang merasa bahwa permasalahan kompensasi telah terselesaikan dengan adanya perjanjian 1965. Kemudian akhirnya Jepang mengeluarkan Korea Selatan dari *whitelist*. Korea Selatan yang juga tidak terima dengan Jepang yang mengeluarkannya dari *whitelist*, melakukan ancaman balik dengan cara memboikot produk-produk asal Jepang yang berada di pasaran Korea Selatan. Selain memboikot produk-produk asal Jepang, Korea Selatan juga mengeluarkan Jepang dari daftar mitra

dagangnya, melarang warga Korea Selatan untuk berwisata ke Jepang, tidak diperbolehkannya iklan produk-produk Jepang berada di dalam siaran televisi.

Dengan adanya ancaman serangan dari Jepang, Korea Selatan berusaha untuk memproduksi mandiri bahan-bahan semikonduktor dan memberikan variasi terhadap pemasok dari Amerika Serikat, China, dan negara-negara lain. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga melakukan berbagai strategi dengan melakukan alokasi anggaran senilai KRW 7,8 triliun selama tujuh tahun ke depan untuk mengamankan pasokan 100 bahan yang dimana berfungsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Jepang. Mengurangi barriers serta melakukan diversifikasi sumber pasokan ke AS, Tiongkok, atau negara-negara lainnya. Memberikan dukungan finansial kepada sebuah perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan asing. Memperluas tax benefits untuk mendatangkan investasi asing, relaksasi peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan untuk meningkatkan produksi (Asih and Suksmonohadi 2019).

Peristiwa tersebut bisa dikatakan bahwa ancaman Jepang terhadap Korea Selatan adalah melalui sebuah tekanan untuk mengubah posisi lawan. Padahal Jepang sengaja untuk melakukan ancaman tersebut kepada Korea Selatan agar ancaman berhenti dan dapat saling melakukan negosiasi. Akan tetapi bukannya ancaman tersebut berhenti, malah ancaman tersebut semakin memburuk dan permasalahan tersebut tidak dapat selesai dengan waktu yang sebentar. Akibat adanya saling mengancam antara kedua negara, negara-negara lain yang melakukan ekspor terhadap kedua negara menjadi terkena imbasnya dan juga mengganggu bagi perekonomian kedua negara tersebut.

3.3 Eskalasi Konflik Fase Utama III

Dalam fase utama ketiga dari eskalasi konflik, fase ini merupakan fase terakhir dalam eskalasi konflik. Dimana para kedua belah pihak akan kehilangan kendali atas segala batasan kekerasan, perselisihan akan berakhir dengan adanya keruntuhan salah satu pihak. Pada fase ini, para kedua belah pihak percaya bahwa posisi mereka tidak dapat didamaikan dan tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan tersebut.

3.3.1 Tahapan Ketujuh

Pada tahapan ketujuh, tujuan untuk menyebabkan terjadinya kerusakan satu sama lain menjadi yang paling utama. Pihak lawan lebih peduli dengan kerusakan pihak lain, yang dimana kerusakan pada pihak lain lebih besar daripada kerusakan yang diterima oleh pihaknya sendiri. Dengan adanya aksi menyerang atau menghancurkan pihak lawan, taktik ancaman bisa dilumpuhkan. Kehancuran itu sendiri dapat memberikan sebuah kompensasi terkait hilangnya kekuasaan dan pengaruh. Akan tetapi, konflik dapat dengan mudah meningkat apabila semua pihak terlibat dalam permainan. Pada tahap ini, Jepang dan Korea Selatan belum menunjukkan bagaimana kedua belah pihak saling menghancurkan. Meskipun perdebatan masih tetap berjalan, untuk menemukan jalan keluar dari adanya perdebatan tersebut masih sulit. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, hubungan kedua negara masih tetap renggang kemudian dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang membuat hubungan kedua negara semakin merenggang.

Pada bab 2 sudah dijelaskan bagaimana Korea Selatan yang mencoba melakukan negosiasi dengan Jepang serta kegagalan kedua negara dalam

mencapai negosiasi untuk menemukan jalan tengah terkait perang dagang serta kerja paksa maupun *comfort women*. Akan tetapi, untuk mencapai tahap tersebut masih sulit dikarenakan masyarakat Korea Selatan yang masih merasakan luka yang mendalam pada saat penjajahan dilakukan oleh Jepang. Serta Jepang yang merasa tidak terima dengan hasil persidangan mengenai kompensasi terhadap para korban kerja paksa dan *comfort women*. Sehingga, untuk tahapan ketujuh ini kedua negara tidak terlihat saling menghancurkan satu sama lain. Dimana walaupun adanya perang dagang, kedua negara tetap melakukan kerjasama di sektor lain selain sektor ekonomi. Adanya kerjasama di sektor lain dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan yang semakin membesar.

3.3.2 Tahapan Kedelapan

Pada tahapan kedelapan, para kedua belah pihak mencoba untuk menyakiti pihak lain secara substansial. Dimana setelah melewati tahapan ketujuh yang membuat frustrasi, para kedua belah pihak memusatkan perhatian kepada efek yang pada dasarnya merupakan sebuah kerusakan dari serangan mereka. Tahapan kedelapan ini, melihat dari kasus keamanan antara kedua negara. Dimana Korea Selatan serta Jepang mendapatkan ancaman dari Korea Utara serta Tiongkok mengenai ancaman nuklir, yang dimana Korea Utara serta Tiongkok akan melakukan serangan nuklir terhadap kedua negara tersebut. Dengan adanya ancaman dari kedua negara tersebut, membuat Korea Selatan serta Jepang mau tidak mau kembali mempererat kerja sama dibidang keamanan atau militer guna untuk memperkuat kedua negara, serta mendapatkan informasi mengenai kedua negara tersebut. Dalam mengambil langkah untuk melakukan kerja sama tersebut, kedua negara cukup berhati-hati untuk mengambil keputusan. Akan tetapi Korea

Selatan sempat melakukan pembatalan perjanjian keamanan tersebut dikarenakan mengingat apa yang telah Jepang lakukan pada Korea Selatan pada masa penjajahan.

Di satu sisi salah satu pihak sudah menerima untuk melakukan sebuah progress kemajuan, agar hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Akan tetapi, disatu sisi pihak lain masih ragu dengan pihak lawan tersebut. Dengan adanya keraguan salah satu pihak, bisa menyebabkan salah satu pihak merasa tersakiti karena pihak lain sudah merasa yakin bahwa kepercayaannya dapat kembali seperti semula dan dapat melakukan kerja sama kembali serta ketegangan dapat berhenti. Dalam permasalahan Korea Selatan dan Jepang, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sangat sulit diselesaikan oleh kedua belah pihak. Akibatnya, tidak ada pihak yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3.3.3 Tahapan Kesembilan

Pada tahap kesembilan ini, merupakan tahapan terakhir. Dimana para kedua belah pihak kehilangan kendali atas segala batasan kekerasan. Konflik berakhir dengan terjadi keruntuhan salah satu pihak. Seperti yang ditulis Glas, para pihak akan menekan semua tombol perusak sekaligus. Apalagi yang berasal dari lingkungan pihak berselisih akan ditarik ke dalam peperangan yang beresiko mengalami sebuah kerusakan. Dalam setiap tahapan tidak bisa menggunakan intervensi yang sama, dimana setiap tingkatan dalam eskalasi memiliki tingkatan yang berbeda sehingga pihak ketiga harus memilih tindakan yang tepat.

Semua usaha telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai jalan tengah terkait permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, sampai saat ini kedua belah

pihak belum menemukan jalan tengahnya. Sehingga, rencana yang sering dilakukan seperti negosiasi atau menjalin sebuah kerja sama antara kedua belah pihak tetap tidak bisa terlaksanakan. Apabila sesuai dengan tahapan eskalasi konflik yang ada, seharusnya salah satu pihak sudah mencapai pada titik kehancuran. Tetapi kedua negara masih tetap berjuang, agar tidak ada salah satu pihak yang mengalami kehancuran. Kedua belah pihak masih memilih pada pendiriannya masing-masing dan terus beranggapan bahwa dirinya sendiri lebih baik daripada pihak lawan. Dari konflik yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan terus mengalami peningkatan, walaupun sempat mengalami penurunan tetapi dengan adanya penurunan tersebut kedua belah pihak tidak ada inisiatif untuk mulai melakukan perdamaian. Adanya peristiwa ini, bukan hanya kedua negara yang mengalami dampaknya, akan tetapi negara-negara lain juga terkena imbasnya.

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Kembali menegangnya hubungan antara Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2019 merupakan awal dari adanya konflik ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan yang sering disebut sebagai perang dagang. Konflik ini terjadi dikarenakan Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan pembatasan ekspor bahan material teknologi tinggi, yang di mana bahan material tersebut biasanya digunakan untuk memproduksi layar telepon pintar dan chip yang digunakan oleh perusahaan elektronik asal Korea Selatan. Dengan adanya perang dagang tersebut memberikan dampak kepada perekonomian di Korea Selatan, menyebabkan perusahaan-perusahaan besar khususnya seperti perusahaan elektronik yang membutuhkan bahan semikonduktor mengalami kesulitan, dikarenakan bahan-bahan semikonduktor yang didapatkan berasal dari hasil ekspor Jepang. Jika Jepang membatasi ekspor, dapat dibayangkan bagaimana perusahaan yang membutuhkan bahan baku tersebut mengalami penurunan produksi ataupun

penjualan. Korea Selatan yang selalu bergantung terhadap ekspor Jepang pun mencoba melakukan negosiasi demi mencegah pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang, akan tetapi Jepang tetap menolak. Penolakan tersebut didasari akibat Jepang tidak ingin membayar kompensasi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan terhadap para korban *comfort women* dan kerja paksa pada saat penjajahan yang dilakukan oleh Jepang.

Berdasarkan teori eskalasi konflik yang digunakan oleh penulis dalam analisis ini, telah dijelaskan bahwa dari adanya perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan bagi perekonomian Korea Selatan pada tahun 2019-2020 adalah mengalami kerugian ekspor tahunan. Melalui teori eskalasi konflik, dapat dilihat bagaimana kedua negara yaitu Jepang dan Korea Selatan dalam menghadapi permasalahan perang dagang serta terjadinya peristiwa saling mengancam dari kedua belah pihak, terutama Korea Selatan yang berusaha untuk tidak terlalu bergantung terhadap ekspor dari Jepang. Di mulai dengan Korea Selatan yang mencoba untuk melakukan negosiasi kepada Jepang terkait permasalahan ganti rugi untuk para korban *comfort women* dan pekerja paksa pada saat penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Akan tetapi Jepang menolak, kemudian Korea Selatan melakukan serangan ancaman kepada Jepang.

Korea Selatan sendiri tetap memilih untuk tetap melanjutkan perang dagang tersebut dikarenakan untuk memberhentikan permasalahan perang dagang antara Jepang dengan Korea Selatan cukup sulit, yang dimana masih terlalu banyak luka mendalam yang dirasakan oleh masyarakat Korea Selatan dikarenakan permasalahan isu *comfort women* serta kerja paksa yang dilakukan pada saat penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Walaupun dengan adanya

perang dagang tersebut memberikan dampak bagi perekonomian Korea Selatan akan tetapi dampaknya tidak terlalu besar, Korea Selatan juga mencoba berbagai cara untuk mengatasi dampak tersebut dengan memproduksi bahan semikonduktor sendiri serta melakukan ekspor dari negara-negara lain. Selain itu, dari adanya perang dagang juga memberikan dampak yang positif bagi produk-produk di dalam negeri dengan memberikan peluang yang besar bagi produk-produk dalam negeri agar lebih maju.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan yang dilakukan oleh Jepang untuk menjaga teknologi yang digunakan oleh keamanan atau militer Jepang. Akan tetapi, skripsi ini hanya terbatas pada pembahasan perang dagang bagi perekonomian Korea Selatan, oleh karena itu penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan yang dilakukan terkait dampak perang dagang dari sudut pandang perekonomian Jepang untuk membuktikan bahwa dari adanya perang dagang juga menyebabkan kerugian bagi kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityani, Fiandra D. 2018. "Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu "Comfort Women" terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan." *Journal of International Relations* Vol. 4, No. 1.
- Asih, Kiki N., and Masagung Suksmonohadi. 2019. "Ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian." *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*.
- Babe, Ann. 2017. "Alasan Korea Selatan adalah tempat ideal untuk perkembangan teknologi robot." BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-42442045>.
- CNN Indonesia. 2019. "Korsel Boikot Mobil Jepang, Penjualan Rontok." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190805154902-92-418531/korsel-boikot-mobil-jepang-penjualan-rontok>.
- Firdausi, Lulu, and Bambang Pujiyono. 2018. "Peran Korean Wave sebagai Soft Diplomacy di Jepang Periode 2012- 2015." *Budi Luhur Journal Of Contemporary Diplomacy*.
- Gracellia, Jeniffer. 2020. "Implikasi Penanganan Masalah Comfort Women Terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pada Tahun 2015-2019." *UPH Journal Of Interantional Relations*, (Juni).
- Impartial Mediator Network. 2012. "Bentuk dan Eskalasi Konflik."
- Impartial Mediator Network. <https://imenetwork.org/bentuk-dan-eskalasi-konflik/>.

Jordan, Thomas. 2000. "Glasl's Nine-Stage Model Of Conflict Escalation." Mediate.com. <https://www.mediate.com/glasls-nine-stage-model-of-conflict-escalation/>.

KBS World. 2020. "Tiga Bahan Utama Semikonduktor yang Dikenakan Pembatasan Ekspor Jepang Kini Diproduksi Mandiri di Korsel." KBS World. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=59336.

Kemala, Anniza. 2018. "Globalisasi Industri Hiburan Jepang dan Korea: Pengaruh Terhadap Perspektif Publik Antar Negara." *Global Jurnal Politik Internasional* Vol. 20, No. 2.

Kim, Felix. 2021. "Jepang dan Korea Selatan bekerja sama untuk menangkal musuh." Indo - Pacific Defense Forum. <https://ipdefenseforum.com/id/2021/04/jepang-dan-korea-selatan-bekerja-sama-untuk-menangkal-musuh/>.

Larasati, Delia A. 2022. "NCT 127 Lanjutkan Tur Dunia, Dimulai dari Jepang BacaNCT 127 Lanjutkan Tur Dunia, Dimulai dari Jepang." detikhot. <https://hot.detik.com/kpop/d-6000457/nct-127-lanjutkan-tur-dunia-dimulai-dari-jepang>.

Lisbet. 2019. "Ketegangan Hubungan Jepang-Korea Selatan dan Implikasinya." *Info Singkat* Vol. XI, No.14.

Mangkuto, Wangi S. 2019. "Perang Dagang Korsel-Jepang, WTO Berpihak ke Tokyo." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190911160451-4-98686/perang-dagang-korsel-jepang-wto-berpihak-ke-tokyo>.

- Mangkuto, Wangi S. 2019. "Jepang-Korsel Segera Dialog Bahas Perang Dagang." CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191104155245-4-112514/jepang-korsel-segera-dialog-bahas-perang-dagang>.
- Mangkuto, Wangi S. 2019. "Kronologi Perang Dagang Jepang-Korea, Dari Luka Perang Dunia." CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190829133707-4-95656/kronologi-perang-dagang-jepang-korea-dari-luka-perang-dunia/3>.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15, No. 1.
- Nugroho, Fahrizal, and M. M. Bahri. 2019. "History and Japanese South Korea Trade Wars." *Japanese Research on Linguistic, Literatur, and Culture* Vol. 2 No. 1.
- Nurbaiti, Lukluk. 2021. "Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor ke Korea Selatan." *JOM FISIP* Vol. 8.
- OEC. 2021. "OEC Data." [oec.world](https://oec.world/en/profile/bilateral-country/kor/partner/jpn). <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/kor/partner/jpn>.
- Putra, I Putu A., Putu R. Dewi, and A.A A. Parameswari. 2019. "Upaya Korea Selatan Mengembalikan Status Mitra Dagang Prioritas yang Dicitakan Jepang Pada Tahun 2019." *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Putri, Dinda Claudia A. 2018. "Penolakan Korban Comfort Women System Dari Korea Selatan Terhadap 2015 Japan-ROK Agreement On Comfort Women." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 7 No.3.

Sebayang, Rehia. 2018. "Ekspor Jepang Bergairah di Bulan April." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521160749-4-15884/ekspor-jepang-bergairah-di-bulan-april>.

Sebayang, Rehia. 2019. "Babak Baru Perang Dagang Jepang-Korsel, Tokyo Desak Negosiasi." CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190830080824-4-95850/babak-baru-perang-dagang-jepang-korsel-tokyo-desak-negosiasi>.

Staff, Reuters. 2019. "WTO top court backs Japan in case against South Korea duties." Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-japan-trade-southkorea-wto-idUSKCN1VV1Z6>.

Stangarone, Troy. 2020. "South Korea and Japan Continue to Struggle to Bridge Their Differences." The Diplomat. <https://thediplomat.com/2020/11/south-korea-and-japan-continue-to-struggle-to-bridge-their-differences/>.

Suryani, Ni Putu E. 2014. "Korean Wave Sebagai Instrumen Soft Power Untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan." *Global* Vol. 16 No.1.